



Wetlands

INTERNATIONAL

Yayasan Lahan Basah (YLBA)

Warta Konservasi Lahan Basah

Vol 29 No. 3, Oktober 2021



Salam redaksi,

Di sela pandemi yang terasa serba membatasi, ada kemudahan teknologi yang memungkinkan manusia untuk lebih terhubung. Istilah webinar (*web-based seminar*) semakin akrab kita gunakan untuk bertukar pikiran mengenai topik tertentu. Teknologi ini pula yang kami gunakan untuk mengkomunikasikan kerja-kerja kami di lapangan, dengan peserta dan nara sumber yang tidak hanya di lokasi tempat kami bekerja, tetapi juga di tingkat nasional dan bahkan internasional.

Dalam edisi WKLB kali ini, pekerjaan yang kami lakukan bersama para Mitra dan masyarakat di Demak, Jawa Tengah dan Tapanuli Selatan, Sumatra Utara telah kami paparkan secara global melalui kemudahan teknologi webinar. Masyarakat di kedua lokasi kegiatan tersebut mendapatkan kesempatan memaparkan hasil kerja mereka bersama, disertai gagasan dan harapan untuk keberlanjutan.

Benarlah, diantara kesulitan selalu muncul kemudahan, tinggal bagaimana kita jeli menemukan peluang untuk memanfaatkannya.

Selamat membaca !

DEWAN REDAKSI:

Pembina:

Direktur
Yayasan Lahan Basah (YLBA) /
Wetlands International Indonesia

Pimpinan Redaksi:

Yus Rusila Noor

Anggota Redaksi:

Triana
Ragil Satriyo Gumilang

“Artikel yang ditulis oleh para penulis, sepenuhnya merupakan opini yang bersangkutan dan Redaksi tidak bertanggung jawab terhadap isinya”



Yayasan Lahan Basah (YLBA) adalah bagian dari jaringan kerja global Wetlands International

Fokus Lahan Basah

Mengembalikan Harmonisasi Manusia dan Alam untuk Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim 3

Kebijakan Lahan Basah

Mendorong Percepatan Kebijakan dan Praktik Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Ekosistem (ECO-DRR) di Ekosistem Gambut 4

Berita Lahan Basah

Kesepakatan Konservasi Desa untuk Pengelolaan Gambut Berkelanjutan di Tapanuli Selatan, Sumatra Utara 6

Lima Tahun Program BwN Indonesia: Masyarakat Demak Tunjukkan Hasil Nyata Pemulihan Pesisir pada Dunia 8

Bincang Iklim Kala Pandemi 10

Kampung Ramah Lingkungan Buana DC 52, Desa Cimande, Bogor, Mewujudkan Lingkungan yang Nyaman dan Sejahtera 12

Keunikan Rawa Danau Undan, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan 14

UCAPAN TERIMA KASIH DAN UNDANGAN

Kami haturkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya khususnya kepada seluruh penulis yang telah secara sukarela berbagi pengetahuan dan pengalaman berharganya untuk dimuat pada majalah ini.

Kami mengundang pihak-pihak yang berminat untuk menyumbangkan bahan-bahan berupa artikel, hasil pengamatan, gambar dan foto, untuk dimuat pada majalah ini. Tulisan diharapkan sudah dalam bentuk *soft copy*, diketik dengan huruf Arial 10 spasi 1,5 maksimal 2 halaman A4 (sudah berikut foto-foto).

Semua bahan-bahan tersebut termasuk kritik/saran dapat dikirimkan kepada:

Triana - *Publication & Communication*
Yayasan Lahan Basah (YLBA)
Jl. Bango No. 11 Bogor 16161
tel: (0251) 8312189
fax./tel.: (0251) 8325755
e-mail: publication@wetlands.or.id

Mengembalikan Harmonisasi Manusia dan Alam

untuk Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim

Triana*

Pada dalam bulan September setidaknya ada dua hari peringatan penting terkait pemulihan bumi dari dampak pencemaran udara. Tanggal 16 September merupakan Hari Pelestarian Ozon Internasional, dan 21 September tentang Hari Tanpa Emisi Sedunia. Kedua *event* tersebut menyerukan kepedulian yang sama bagi seluruh umat manusia agar turut berperan aktif dalam mencegah dan menanggulangi pemanasan global.

Gas rumah kaca (GRK) yang teremisikan dari bumi dan kemudian terkonsentrasi di atmosfer akan menghalangi dan memantulkan kembali gelombang *infra red* dan

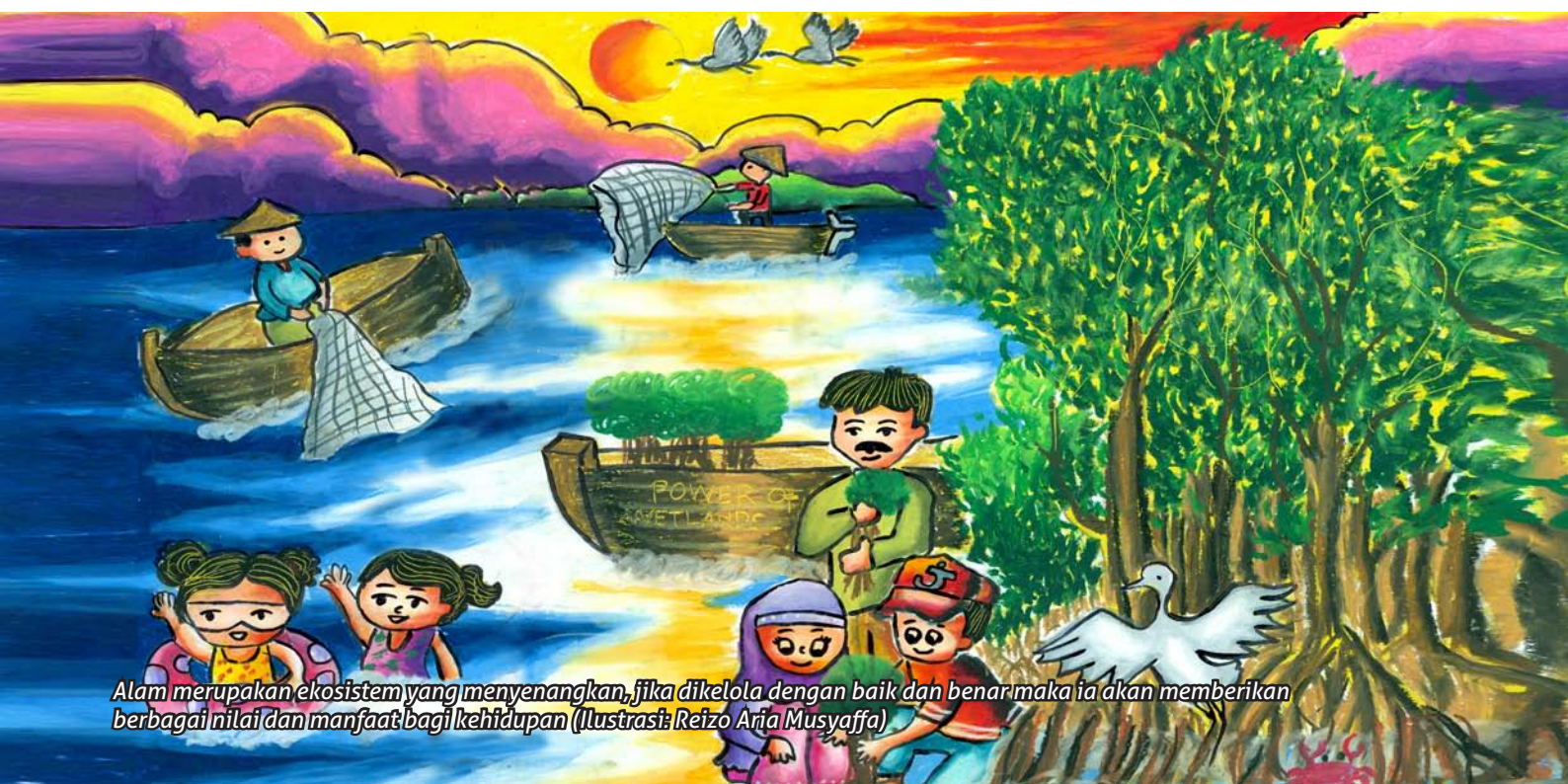
sinar ultra violet yang dipancarkan bumi ke atmosfer, sehingga suhu di bumi meningkat lebih panas dan memicu pemanasan global.

Bagi kita yang mengalami perjalanan hidup di dekade 80-an, pasti dapat merasakan perubahan suhu udara yang cenderung semakin meningkat dari waktu ke waktu. Perubahan suhu yang semakin panas juga terjadi hampir di seluruh belahan bumi. Aktivitas manusia ditengarai menjadi penyebab utama terjadinya pemanasan global. Meningkatnya jumlah populasi manusia menyebabkan konsekuensi logis meningkatnya berbagai kebutuhan dan keinginan. Namun

sayangnya, seringkali manusia bersikap berlebihan dan tidak bijak dalam upaya pemenuhan semua kebutuhan itu.

Era industrialisasi yang dimulai pada abad ke-18, dapat dikatakan menjadi awal perubahan peradaban manusia dalam mengelola sumber daya alam dan mengolah barang, dari sistem tradisional menjadi lebih modern. Namun amat disayangkan acapkali kegiatan yang dilakukan manusia dalam mengelola sumber daya alam cenderung eksploitatif dan materialistis tanpa mempertimbangkan keberlangsungan ekosistem dan dampak yang akan ditimbulkan.

.....bersambung ke hal 16



Alam merupakan ekosistem yang menyenangkan, jika dikelola dengan baik dan benar maka ia akan memberikan berbagai nilai dan manfaat bagi kehidupan (Ilustrasi: Reizo Aria Musyaffa)

Mendorong Percepatan Kebijakan dan Praktik Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Ekosistem (ECO-DRR) di Ekosistem Gambut

Susan Lusiana*

Gambut merupakan lahan yang unik dimana kondisinya harus selalu basah dan tergenang air, oleh karenanya 'drainase' adalah sesuatu yang sangat dihindarkan dalam pengelolaan gambut secara berkelanjutan. Lahan gambut yang dikeringkan akan menyebabkan konsekuensi penting terhadap dampak sosial maupun ekonomi. Gambut kering akan mudah teroksidasi sehingga karbon akan terlepas secara terus menerus ke atmosfer dalam bentuk CO₂, pada akhirnya memberikan kontribusi terhadap perubahan iklim. Gambut kering juga sangat rentan terbakar.

Pengalaman buruk telah membuktikan bahwa kebakaran gambut telah menghancurkan jutaan hektar lahan, kabut asapnya mengganggu kesehatan masyarakat bahkan berdampak luar biasa bagi perekonomian nasional maupun regional. Dampak lain yang dialami lahan gambut jika dikeringkan adalah terjadinya penurunan muka tanah (*land subsiden*) hingga di bawah permukaan sungai atau laut, sehingga lahan menjadi tergenang dan banjir di saat curah hujan tinggi atau air sungai meluap.

Pemerintah sebagai pemegang mandat dan otoritas dalam pengelolaan sumber daya alam termasuk lahan gambut, berkomitmen untuk terus melakukan berbagai upaya rehabilitasi dan restorasi gambut. Selain ditujukan untuk pengurangan risiko bencana, restorasi gambut juga memegang peranan penting dalam proses pembangunan secara berkelanjutan dalam konteks luasnya. Beberapa praktik baik telah dilakukan oleh pemerintah dan juga berbagai pihak dalam konteks pengurangan risiko



Wetlands
INTERNATIONAL
Yayasan Lahan Basah (YLBA)



UNIVERSITAS GADJAH MADA
FAKULTAS GEOGRAFI



Co-funded by
the European Union



W E B I N A R

“Mendorong Percepatan Kebijakan dan Praktik Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Ekosistem (Eco-DRR) di Ekosistem Gambut”

bencana. Sebagai upaya untuk diseminasi informasi dan untuk mendorong replikasi praktik-praktik baik tersebut, dalam rangka pencapaian target restorasi dan keberlanjutannya di Indonesia, Pemerintah RI melalui Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), telah berkolaborasi menyelenggarakan kegiatan webinar dan workshp nasional guna mendorong percepatan kebijakan pengurangan risiko bencana berbasis ekosistem (Eco-DRR), pada tanggal 13-14 Oktober 2021. Penyelenggaraan juga melibatkan Yayasan Lahan Basah (YLBA), sebagai salah satu LSM yang bergerak dalam bidang perlindungan lahan basah di Indonesia, dan Fakultas Geografi, Universitas Gadjah Mada (UGM).

Kolaborasi antar lembaga dan para pihak sangat penting karena pengurangan risiko bencana mencakup tiga elemen dasar, yaitu lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi.

"Kita memerlukan kolaborasi efektif, tidak hanya dikerjakan pemerintah pusat saja tapi juga perlu melibatkan pemerintah daerah dan pemerintah desa, LSM, maupun masyarakat," ungkap Deputi Bidang Edukasi, Sosialisasi, Partisipasi dan Kemitraan BRGM, Myrna Safitri.

Ditambahkannya, upaya pengurangan risiko bencana melalui restorasi gambut, harus

masuk dalam wacana besar ketika pelaksanaan pembangunan. "Kami belajar banyak dari pengalaman jatuh bangun selama 5 tahun terakhir untuk mengupayakan agar kegiatan restorasi gambut menyelaraskan ekonomi dan sosial hingga di tingkat tapak," katanya. Myrna menambahkan bahwa inisiatif-inisiatif dalam restorasi gambut, harus *manageable* dan *compatible* dengan instrumen dan program pembangunan yang ada dengan belajar dari apa yang sudah dilakukan dan mengoptimalkan kebijakan yang ada.

Direktur Pengendalian Kerusakan Gambut KLHK, Budi Susanti mengatakan hal yang sama bahwa kegiatan restorasi gambut dalam pengurangan risiko bencana mustahil dapat dikerjakan sendiri, diperlukan sinergi dan kolaborasi dari berbagai pihak, apalagi mengingat negara Indonesia memiliki ekosistem gambut tropis terluas di dunia. Budi Susanti menyebutkan bahwa keberhasilan pemulihan ekosistem gambut berperan penting dalam upaya pengendalian karhutla. Pemerintah saat ini telah menetapkan PP No. 60/2019 yang diturunkan melalui Permenlhk No. 246/2020 tentang Rencana Perlindungan Pemeliharaan Ekosistem Gambut (RPPEG) Nasional. Dokumen ini selanjutnya mewajibkan pemerintah daerah untuk menyusun RPPEG yang menjadi dasar penyusunan RPPLH di daerah dan dimasukkan kedalam rencana pembangunan di daerah. Saat ini sudah ada 19 provinsi yang mendapatkan supervisi dan pelatihan, satu diantaranya telah ditetapkan yakni RPPEG Provinsi Kalimantan Tengah dan Kotawaringin Barat untuk level Kabupaten. Pemerintah juga sedang mengembangkan SIPPEG (Sistem Informasi Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut) sebagai platform data dan informasi gambut terintegrasi.

.....bersambung ke hal 18



Tanaman Jelutung, adalah salah satu jenis tanaman khas gambut yang digunakan dalam kegiatan rehabilitasi lahan gambut di Tapanuli Selatan. (Foto: Didik Fitrianto)

Kesepakatan Konservasi Desa untuk Pengelolaan Gambut Berkelanjutan di Tapanuli Selatan, Sumatra Utara

*Didik Fitrianto**

Muara Batang Toru merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Tapanuli Selatan yang memiliki lahan gambut cukup luas, yaitu sekitar 2000 hektar. Namun sayang, selama sepuluh tahun terakhir mengalami ancaman dan kerusakan yang terus meningkat, diantaranya alih fungsi lahan menjadi pemicu utama. Dibukanya lahan gambut menjadi perkebunan sawit menjadi pembuka bencana di desa-desa sekitar. Banjir, kebakaran lahan dan subsiden, menjadi ancaman nyata yang dihadapi masyarakat sehari-hari.

Bencana alam di lahan gambut membuat sumber ekonomi utama mereka, sawit semakin tidak produktif, jangan bayangkan penghasilan berton-ton, mendapatkan 400 kilo (per hektar) setiap kali panen dalam dua minggu sekali sudah sangat beruntung bagi mereka. Kejayaan sawit hanya sempat dinikmati di lima tahun pertama sejak penanaman. Saat ini kerusakan lahan gambut menjadi salah satu penyebab menurunnya ketanggungan masyarakat secara ekonomi, tingkat kemiskinan semakin meningkat.

Apa yang sudah dilakukan?

Menyelamatkan lahan gambut menjadi satu-satunya jalan bagi masyarakat untuk keluar dari ancaman bencana. Melalui program Eco DRR Devco dan PME – IKI, masyarakat di Kelurahan Muara Manompas dan Desa Terapung, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatra Utara, sudah memulainya dua tahun lalu, yang difasilitasi oleh Yayasan Lahan Basah (YLBA). Saat ini sudah terbentuk 35 kelompok masyarakat di kedua wilayah tersebut dalam rangka mendukung kegiatan rehabilitasi kawasan melalui pembangunan sekat-sekat kanal



Bibit tanaman sagu hasil persemaian yang siap untuk ditanam di gambut, sebagai bagian dari kegiatan rehabilitasi lahan gambut di Tapanuli Selatan. (Foto: Didik Fitrianto)

untuk membasahi kembali lahan gambut (*rewetting*), penanaman kembali lahan gambut dengan tanaman paludikultur (revegetasi), dan melakukan mata pencaharian alternatif (revitalisasi ekonomi).

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Selatan, Syahrir Siregar di acara miniloka karya 'Membangun Kesepakatan Konservasi Desa dan Ekspedisi Gambut' menyampaikan, **"Kegiatan yang dilakukan 35 kelompok tani di Muara Manompas dan Terapung menjadi contoh baik bahwa kegiatan konservasi bisa dilakukan secara terintegrasi, lahan gambut yang rusak direstorasi, masyarakat dibantu dengan pemberian pinjaman modal usaha, dan modal sosial dibangun dengan dibentuknya kelompok-kelompok tani. Dalam hal ini pendekatan yang dilakukan oleh YLBA bisa menjadi contoh baik di Tapanuli Selatan bahwa kegiatan**

konservasi lingkungan juga harus diikuti dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitarnya".

Salah satu perwakilan kelompok, Waldemart Silitonga menambahkan, salah satu kunci sukses kegiatan restorasi lahan gambut di Muara Manompas dan Terapung adalah pelibatan masyarakat. Dahulu jangankan mengelola lahan gambut, tentang gambut pun masyarakat tidak tahu menahu, yang ada dipikiran saat itu hanya sawit, sawit dan sawit. Semua berubah saat ada program PME dan Devco dari YLBA, yang melakukan pendampingan intensif, memberikan pelatihan tentang pengelolaan lahan gambut, kegiatan usaha dan penguatan kelembagaan kelompok.

Vernando Aruan Fasilitator YLBA dalam miniloka karya melaporkan, sampai saat ini program PME dan Devco di Muara Manompas dan Terapung sudah menyalurkan dana pinjaman untuk modal usaha dengan mekanisme *Bio-Rights* sebesar Rp. 2,1 milyar untuk 35 kelompok. Membangun 14 sekat kanal, 5 sumur bor, 83 sumur pantau dan penanaman tanaman jelutung sebanyak 10.300 bibit dengan keberhasilan hidup 80% .

Selain itu, untuk kegiatan ekonomi dibangun juga KJA (Kolam Jaring Apung) sebanyak 4 unit, kolam terpal 5 unit, rumah magot 1 unit. Untuk kegiatan penanggulangan kebakaran di lahan gambut sudah dibentuk MPA (Masyarakat Peduli Api), 21 unit *Early Warning System* (EWS) kebakaran lahan, Menara pantau 11 unit, embung 29 unit dan peralatan pemadaman sebanyak 3 unit.

Membangun Kesepakatan Pengelolaan Gambut Berkelanjutan

Apa yang saat ini dilakukan 35 kelompok di Muara Manompas dan Terapung dalam melakukan kegiatan restorasi lahan gambut perlu dukungan dari berbagai pihak. YLBA tidak bisa selamanya melakukan pendampingan karena keterbatasan program, untuk itu perlu adanya estafet untuk melanjutkan kegiatan restorasi lahan gambut yang sudah dilakukan oleh kelompok. Program YLBA boleh saja berhenti, tetapi pengelolaan lahan gambut di Tapanuli Selatan harus terus berlanjut.

.....bersambung ke hal 19



Para peserta miniloka karya dan ekspedisi gambut, yang juga melakukan pengamatan langsung kegiatan masyarakat bersama YLBA di Muara Manompas. (Foto: Dok. YLBA)

Lima Tahun Program BwN Indonesia: Masyarakat Demak Tunjukkan Hasil Nyata Pemulihan Pesisir pada Dunia

Ragil Satriyo Gumilang*

Sebelass kelompok masyarakat desa pesisir di Kabupaten Demak memaparkan secara langsung pengalaman dan capaian pemulihan pesisir kepada pihak-pihak di daerah, nasional, hingga global. Setelah memulai kerja sama sejak lima tahun lalu, Konsorsium *Building with Nature* Indonesia (Membangun Bersama Alam) kini mengakhiri programnya di Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Pemulihan secara fisik berupa pembangunan perangkat sedimen untuk pertumbuhan mangrove secara alami, penyelerasan pengembangan budidaya perikanan dan mangrove serta pengembangan jalur hijau mangrove telah dilakukan. Berbagai kegiatan tersebut dipadukan dengan pengembangan

ekonomi masyarakat dan penyusunan kebijakan untuk meyakinkan keberlanjutan berbagai hasil yang telah dicapai. Pemerintah Kabupaten Demak memastikan bahwa upaya pemulihan pesisir tersebut diakomodir keberlanjutannya melalui RPJMD 2022-2026.

Bupati Demak, dr. Hj. Eisti'anah, S.E, mengapresiasi keberhasilan kegiatan kerja sama dan berkomitmen untuk terus melakukan pendampingan dan memastikan keberlanjutan kegiatan di wilayah pesisir Kecamatan Sayung, Karangtengah, dan Bonang.

"Melalui dinas terkait, Pemerintah Kabupaten akan terus melakukan

pendampingan agar masyarakat, khususnya yang berada di wilayah pesisir, bisa melanjutkan apa yang telah dimulai", ujarnya dalam diseminasi yang diselenggarakan konsorsium BwN Indonesia secara luring dan daring pada Kamis (30/9/2021).

Kerja sama yang telah dilakukan diarahkan untuk pemulihan pesisir secara fisik berupa pembangunan perangkat sedimen untuk pertumbuhan mangrove secara alami, serta penyelerasan pengembangan budidaya perikanan dan mangrove serta pengembangan jalur hijau mangrove. Keseluruhan kegiatan tersebut dilakukan melalui keterlibatan masyarakat sejak dari pengembangan gagasan, pelaksanaan kegiatan hingga pemantauan dan evaluasi serta pemaparan hasil kegiatan.



“Pemilik kegiatan yang sesungguhnya adalah anggota kelompok masyarakat. Merekalah yang memberikan gagasan, melaksanakan dan sekaligus menarik pelajaran dari keberhasilan maupun kegagalan,” ujar Plt. Direktur Yayasan Lahan Basah dari konsorsium BwN Indonesia, Yus Rusila Noor.

Apresiasi juga diberikan oleh Duta Besar Belanda untuk Indonesia, Lambert Grijns. “Kita menghadapi banyak tantangan, saya dari Jakarta sudah melihat bahwa di Demak banyak sekali mencapai hasil. Saya tahu ini tidak gampang, kita menghadapi masalah yang sama dengan Belanda, menghadapi iklim yang berubah, banjir yang lebih tinggi, kita harus bertindak untuk sesuatu yang tidak mudah. Tapi saya yakin dan percaya perubahan ke arah yang lebih baik telah dilakukan masyarakat bersama dengan program BwN Indonesia,”katanya.

Harapannya, program BwN dapat direplikasi di wilayah lain di Indonesia yang mengalami masalah yang serupa, bahkan juga ke negara-negara lain yang memiliki kerentanan yang sama.

Keberhasilan Masyarakat dalam Mengelola Program

Dalam acara penutupan program ini, perwakilan kelompok yang hadir juga berkesempatan untuk memaparkan capaian yang telah mereka lakukan dalam lima tahun ini. “Kerusakan alam di sekitar desa kami tidak dapat dihindari seiring dengan pertambahan jumlah penduduk dan juga alih fungsi lahan. Dibangunnya struktur perangkap sedimen atau *Hybrid Engineering* (HE), telah kami buat bersama anggota kelompok. Dari bahan-bahan lokal

yang mudah ditemukan dan dirakit. HE tidak hanya dapat membantu pecahnya gelombang laut tapi juga sebagai perangkap sedimen yang dapat dijadikan tempat tumbuhnya mangrove secara alami. Kini kami telah merasakan manfaatnya yang luar biasa dari kerja keras ini,” ujar Nur Chomaidi, Ketua Kelompok Berkah Alam, Desa Surodadi, Kecamatan Sayung.

Ditambahkan perwakilan masyarakat lainnya, Ahmad Busro, jalur hijau mangrove yang telah dibuat masyarakat melalui program BwN, juga memberikan dampak yang sangat baik bagi kehidupan masyarakat di sekitar desanya. “Jalur hijau mangrove yang semula hanya seluas 3,7 hektar kini telah bertambah menjadi 16 hektar. Mangrove-mangrove tumbuh alami,” ujarnya.

Abdul Ghofur dari Kelompok Tani Jaya Bakti, Desa Tambakbulusan, Kecamatan Karangtengah, yang menyampaikan materi budidaya tambak terhubung mangrove (*Associated Mangrove Aquaculture*) juga menceritakan bagaimana program BwN telah berhasil meningkatkan ekonomi masyarakat. “Karena lokasi tambak sekitar pabrik, jadi memang banyak logam-logam berat yang masuk ke lokasi tambak. Dengan budidaya tambak terhubung mangrove, bukan saja dapat memperkuat sabuk hijau di pinggir sungai tetapi juga dapat menjadi filter bagi air yang masuk ke tambak sehingga mutu air dan tanah tambak membaik sehingga hasil tambak juga meningkat. Tiga tahun memang baru terlihat hasilnya, dan kami telah melakukannya selama hampir lima tahun ini dan hasil tambaknya luar biasa,” jelas Ghofur. Kini lokasi tambak-tambak kelompoknya banyak didatangi sejumlah mahasiswa untuk melakukan sejumlah penelitian.

Sementara itu, perwakilan dari kelompok perempuan Kartini Bahari, Nila Diana Wardah, mengatakan bahwa para perempuan membentuk kelompok guna mengikuti sekolah

lapang. Sejumlah pengetahuan tentang pengelolaan tambak mereka dapatkan dari sekolah tambak. “Kami membuat pupuk organik dengan memanfaatkan limbah rumah tangga, jadi sangat ekonomis sekali dan bisa menghemat pengeluaran dalam rumah tangga. Sejak adanya BwN, kami tidak hanya mendapat ilmu untuk mengelola tambak, tapi kami juga berdaya secara ekonomi karena dapat menjual hasil budidaya tambak kami dalam berbagai produk,” akunya. Ragam produk berupa bawang goreng ebi, terasi rebon dan kerupuk ikan sudah dijual kelompok lewat *market place*, sehingga tidak terbatas di Kabupaten Demak saja.

Kelompok masyarakat setempat terlibat penuh dalam kegiatan, mulai dari desain proyek, pelaksanaan program hingga pemantauan dan evaluasi. Para pemilik tambak juga telah merelakan sebagian tambak budidayanya untuk dikonversi menjadi jalur hijau mangrove sebagai timbal balik dari dukungan dalam peningkatan mata pencaharian mereka. Dukungan dari Pemerintah Desa dalam bentuk Peraturan Desa sangat membantu berbagai inisiatif masyarakat di tingkat tapak untuk dapat melaksanakannya secara berkelanjutan. Masyarakat juga memiliki keleluasaan untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan.

Saat ini tanggung jawab pengelolaan program telah diambil alih oleh kelompok masyarakat. Program yang dikelola oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian PUPR, serta konsorsium Wetlands International dan Ecoshape bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Demak, merupakan kerja sama para ahli di bidang rekayasa, ekologi, budidaya perikanan, pengembangan masyarakat dan tata kelola lingkungan. Program ini telah menerima *Dutch Engineering Award* 2016 kategori karya rekayasa inovatif dari Kerajaan Belanda serta *Flood & Coast Excellence Award* di Inggris pada 2020.**

*Senior Communication & Policy Officer
Yayasan Lahan Basah
Email: ragilsatriyo@wetlands.or.id

Bincang Iklim Kala Pandemi

Yus Rusila Noor*

Ketika Warta ini sampai di tangan para Pembaca, ribuan peserta sedang berkumpul di Scottish Event Campus, Glasgow, Skotlandia. Mereka sedang mengikuti pertemuan para Pihak (CoP) 26 Konvensi Kerangka Kerja PBB terkait perubahan iklim atau *United Nation Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC), 1 – 12 November 2021.

Agenda utama yang dibahas dalam pertemuan tahun ini adalah untuk memantau sampai sejauh mana pemenuhan komitmen masing-masing negara, yang tertuang dalam Kontribusi

Terarahkan Nasional (*Nationally-Determined Contribution NDC*). Pertemuan CoP 21 UNFCCC tahun 2015 yang diadakan di Paris, Perancis, memang telah berhasil merumuskan kesepakatan negara-negara pihak, yang kemudian disebut sebagai *Paris Agreement*. Kesepakatan tersebut pada intinya menyetujui usaha bersama untuk membatasi pemanasan global dibawah 2°C, lebih disukai jika 1,5°C, dibandingkan dengan keadaan pra-industri, yang dilakukan melalui upaya untuk menekan emisi gas rumah kaca sesegera mungkin.

Selain acara resmi yang diikuti oleh para delegasi yang mewakili negara-negara pihak, pertemuan juga diperkaya dengan berbagai pertemuan *side event* yang memfasilitasi curah pendapat diantara para peserta, baik anggota delegasi maupun para pemantau (*observer*). Wetlands International, sebuah organisasi non-profit global yang bergerak dalam pelestarian dan pemanfaatan lahan basah secara bijaksana, juga turut serta mendukung Paviliun Indonesia maupun mengorganisir Paviliun Lahan Gambut (*Peatlands Pavilion*) dan Paviliun Air (*Water Pavilion*) di Glasgow dan



Jakarta. Tujuan keikutsertaan Wetlands International lebih difokuskan kepada peningkatan penyadartahuan mengenai peran lahan basah sebagai salah satu solusi terbaik untuk menangani perubahan iklim, yang didasarkan pada pengalaman intensif selama puluhan tahun di lapangan. Termasuk didalamnya adalah dengan menyertakan lahan basah sebagai solusi bijaksana dalam NDC masing-masing negara. Secara nyata, Wetlands International berupaya memobilisasi pendanaan untuk kegiatan restorasi dan konservasi lahan basah, yang berasal dari sumber-sumber publik dan swasta, termasuk peran penting pasar karbon sukarela. Diharapkan upaya ini dapat membantu negara-negara untuk bergerak melebihi komitmen yang telah dibuat, dan sekaligus memaknai bahwa target *net-zero* dan pembangunan berkelanjutan

akan sulit dicapai tanpa melindungi dan merestorasi lahan basah secara global.

Satu minggu pertama pertemuan, topik alam dan air ternyata telah mendapatkan perhatian cukup besar. Hubungan antara iklim dan alam nampaknya telah lebih dapat dimengerti, dan Solusi Berbasis Alam (*Nature-based Solution*) banyak mengemuka. CoP 26 memberikan sinyal permulaan baru terkait kebutuhan untuk meneguhkan investasi di bidang solusi berbasis alam sebagai bagian utama dari aksi iklim. Diskusi yang telah berlangsung berkisar dari topik lahan gambut dalam NDC, cerita keberhasilan restorasi lahan basah, membuka keuangan sektor swasta serta berbagai inisiatif proyek adaptasi solusi berbasis alam yang layak didanai.

CoP 26 UNFCCC bukan pertemuan yang mudah. Selain diperlukan adanya konsensus negara-negara pihak untuk dapat melakukan aksi melebihi target yang telah dibuat, pertemuan ini menjadi lebih rumit karena dilaksanakan berbarengan dengan kondisi pandemi yang dialami hampir seluruh negara. Target ambisius penurunan emisi gas rumah kaca nampaknya kemudian akan berhadapan dengan target ambisius lain terkait pertumbuhan ekonomi pasca-pandemi.

Tentu sangat dinanti juga aksi nyata kita semua, termasuk para pembaca, untuk memulai gaya hidup yang lebih ramah iklim, agar dapat menyerahkan bumi yang lebih layak huni kepada anak cucu kita.

** Plt. Direktur Yayasan Lahan Basah
Email: yus.noor@gmail.com*

Kampung Ramah Lingkungan Buana DC 52, Desa Cimande, Bogor Mewujudkan Lingkungan yang Nyaman dan Sejahtera

*Iyan Subyandi**

Mendengar kata Cimande sontak ingatan kita akan tertuju pada pengobatan tradisional patah tulang. Pengobatan tradisional patah tulang Cimande sudah menjadi identitas bagi wilayah Desa Cimande yang sangat dikenal oleh masyarakat Bogor maupun yang berada di luar Bogor.

Masyarakat Cimande dikenal sangat agamis dan masih memegang kuat kearifan lokal dan tradisi budaya sekitar yang diwariskan leluhur. Salah satu kekayaan budaya Desa Cimande

bahkan mendunia adalah seni beladiri Cimande yang diperkirakan sudah ada sejak pertengahan abad 18 silam. Tidaklah mengherankan apabila kemudian desa ini memiliki potensi besar menjadi tujuan wisata berbasis kebudayaan.

Desa Cimande yang masuk dalam wilayah Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dialiri beberapa aliran sungai salah satunya yaitu Sungai Cimande. Ada yang mengatakan bahwa nama Desa Cimande berasal dari nama sungai tersebut.

Sebagai desa yang juga memiliki sumber daya alam ekosistem Daerah Aliran Sungai (DAS), pemerintah setempat berupaya untuk terus mengembangkan sektor pertanian dan pembangunan desa pariwisata berbasis lingkungan di Desa Cimande. Harapan besar ke depan, DAS Cimande akan semakin bersih dan lestari. Terjaganya fungsi dan manfaat DAS Cimande tentu akan memberikan dampak positif bagi terpeliharanya nilai-nilai histori wilayah, terjaganya tradisi dan budaya lokal, serta terbukanya peluang pengembangan mata pencaharian masyarakat setempat.



Dokumentasi kegiatan KRL Buana DC 52 (Foto: Iyan Subyandi)



Bersih-bersih lingkungan DAS Cimande



Bank sampah



Pengelolaan limbah plastik



Penghijaun pekarangan rumah dengan tanaman sayuran



Pemanfaatan dan pengelolaan bambu menjadi barang bernilai ekonomis, seperti anyaman dan gelas bambu



Kampung Ramah Lingkungan Buana DC 52

Dalam rangka mendukung program pengelolaan dan pemeliharaan lingkungan serta penguatan perekonomian masyarakat di wilayah Desa Cimande, masyarakat Kampung Nangoh khususnya RT 05/RW 02 yang masuk kedalam wilayah Desa Cimande, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, berinisiatif membentuk sebuah wadah organisasi kemasyarakatan yang diberi nama "Kampung Ramah Lingkungan (KRL) Buana DC 52". Dirintis mulai 30 Desember 2020 dan baru kemudian disahkan legalitasnya pada tanggal 9 Februari 2021 oleh Pemerintah Desa Cimande berdasarkan SK No: 05/02/2021/KPTS/KDS, KRL Buana DC 52 aktif dan fokus melakukan berbagai kegiatan pelestarian lingkungan serta pengembangan ekonomi kreatif.

KRL Buana DC 52 yang berada di bawah pengawasan dan bimbingan dari pemerintah Desa Cimande,

Satgas Lingkungan Hidup Kec. Caringin, dan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bogor ini, memiliki visi yaitu "terwujudnya lingkungan masyarakat yang nyaman, bersih, sehat, dan sejahtera".

Beberapa kelompok kerja yang di bentuk oleh KRL Buana DC 52 dalam menjalankan program-program kerjanya, antara lain:

- Kelompok Kerja Pengelolaan Sampah
- Kelompok kerja Observasi dan Konservasi Lingkungan
- Kelompok Kerja Peningkatan Ekonomi Kreatif
- Kelompok Kerja Sanitasi Lingkungan

Para pengurus Kampung Ramah Lingkungan Buana DC 52 mendisain serta memprogramkan agar Kampung Ramah Lingkungan Buana DC 52 menjadi wisata edukasi pertanian dan pengelolaan limbah rumah tangga. Selain itu

kearifan lokal Desa Cimande yang mempunyai seni tradisional pencak silat beserta unsur lain didalamnya dinilai akan mempermudah para pengurus dalam mengembangkan konsep Kampung Ramah Lingkungan ke beberapa wilayah di Desa Cimande.

M. Diki Haryadi, Wakil Ketua Kampung Ramah Lingkungan Buana DC 52 Desa Cimande Kabupaten Bogor, menuturkan "Dengan didukung semangat berkarya dan komitmen seluruh anggotanya, kami meyakini bahwa suatu saat nanti Kampung Ramah Lingkungan Buana DC 52 akan menjadi salah satu Destinasi Wisata Desa di Kabupaten Bogor".

Konsep wisata edukasi yang diterapkan Kampung Ramah Lingkungan Buana DC 52 nantinya dapat diintegrasikan dengan seluruh KRL yang ada di desa Cimande. ••

* Admin Officer
Yayasan Lahan Basah
Email: iyan_subyandi@wetlands.or.id

Keunikan Rawa Danau Undan, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan

Herliwati* & Mijani Rahman*

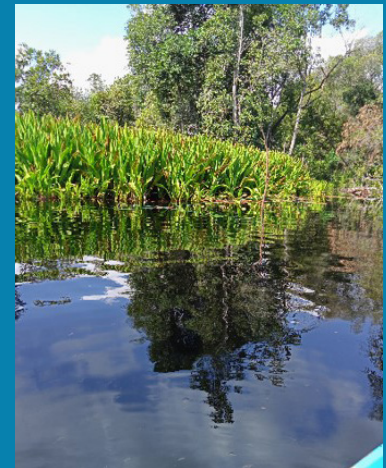
Rawa Danau Undan merupakan salah satu rawa pedalaman yang terletak di Desa Talan, Kecamatan Banua Lawas, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan. Rawa ini memiliki ekologi spesifik berupa airnya berwarna kehitam-hitaman atau *blackwater* dan keanekaragaman hewan dan tumbuhan yang hidup di perairan rawa tersebut.

Rawa Undan memiliki lima bagian, yaitu Undan Kluwang, Undan Kecil, Undan Kuning, Undan Besar dan Undan Pengawahan. Sejak Tahun 1995, kawasan Danau Undan berstatus sebagai reservat, walaupun sampai saat ini tidak ditemukan landasan hukum yang menguatkan status tersebut.

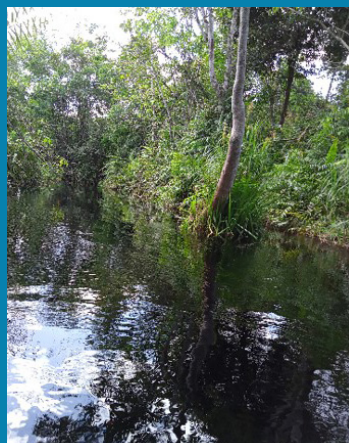
Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan Rawa Danau Undan dikelilingi kebun karet, dan banyak ditumbuhi tanaman perdu serta tumbuhan yang memiliki batang yang berdiameter cukup besar. Tepat di bagian pinggirannya banyak ditumbuhi bermacam-macam tanaman hias seperti jenis palem, paku pakuan, keladi yang mempunyai daun lebih menarik dibandingkan dengan tumbuhan keladi yang sering kita temui di daratan. Sedangkan pada badan airnya sebagian besar ditumbuhi oleh Bakung Putih (*Crinum asiaticum* Linn), Kumpai Miang (*Hymenachne interrupta* Buese) dan banta (*Leesia hexandra*).



Tanaman berukuran besar yang hidup di pinggir Perairan Danau Rawa Undan (*Black water*)



Tanaman Bakung Putih yang hidup di perairan rawa Danau Undan (*Crinum asiaticum* Linn)



Tanaman Paku Pakuan yang hidup di pinggir rawa Danau Undan



Rerumputan yang hidup di pinggir rawa Danau Undan

Menurut masyarakat yang berada di sekitar Danau Rawa Undan, di daerah ini masih ditemukan beruang madu, monyet, orang utan dan berbagai jenis burung. Berdasarkan beberapa hasil penelitian beruang madu ini menyukai hidup di hutan primer,

hutan skunder dan di lahan lahan pertanian. Mereka biasa hidup pada ketinggian 2-7 meter dari tanah dan makanannya berupa aneka buah buahan, dan tanaman jenis palem. Mereka juga memakan serangga, burung dan binatang kecil lainnya.

Rawa Danau Undan juga memiliki keanekaragaman jenis ikan yang tinggi. Berdasarkan penelitian yang kami lakukan pada tahun 2021, terdapat 26 jenis ikan yang ditemukan diantaranya masuk dalam kategori langka. Jenis jenis ikan tersebut dapat dilihat pada Tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1. Jenis Jenis Ikan yang Ditemukan di Danau Rawa Undan

No	Jenis Ikan	Nama Ilmiah	Sungai Talan dan Danau Undan
1	Tauman	<i>Channa micropeltes</i>	++
2	Gabus	<i>Channa striata</i>	++
3	Mihau	<i>Channa lucius</i>	++
4	Kihung	<i>Channa melanopterus</i>	-
5	Kerandang	<i>Channa pleurophthalma</i>	++
6	Betok	<i>Anabas testudineus</i>	++
7	Kapar	<i>Polycanthus hasselti</i>	++
8	Patung	<i>Pristolepis grootii</i>	o
9	Biawan	<i>Helostoma temminckii</i>	++
10	Sepat rawa	<i>Trichogaster trichopterus</i>	++
11	Sepat siam	<i>Trichogaster pectoralis</i>	++
12	Sepat layang	<i>Trichogaster leeri</i>	++
13	Lele	<i>Clarias batracus</i>	++
14	Belut	<i>Monopterus alba</i>	
15	Tapah	<i>Wallago leeri</i>	oo
18	Belida	<i>Chitala lopis</i>	o
19	Seluang tamba	<i>Rasbora chepalutaenia</i>	++
20	Seluang batang	<i>Rasbora einthovenia</i>	++
21	Menangin	<i>Thynnichthys thynnoides</i>	o
22	Lais bamban	<i>Cryptopterus apogon</i>	-
23	Lais kaca	<i>Cryptopterus lais</i>	-
24	Lais sungai	<i>Cryptopterus micronema</i>	-
25	Lais kuning	<i>Callichrous leiacanthus</i>	-
26	Lais tabiring	<i>Belodonichthys dinema</i>	-

Keterangan: ++ Umum
o Langka
- Jarang
oo Terancam punah

*Fakultas Perikanan dan Kelautan
Universitas Lambung Mangkurat
Email: herli.wati@ulm.ac.id

.... sambungan dari halaman 3

Mengembalikan harmonisasi manusia dan alam

Lahan basah yang memiliki berbagai nilai dan manfaat penting bagi kehidupan (baik secara ekologi, sosial, ekonomi, maupun politik), sering dijadikan objek eksploitasi yang tidak terkendali akibat kerakusan manusia. Seperti yang diungkapkan Nyoman Suryadiputra, Penasihat Senior YLBA, pada kesempatan *talk show* daring di Radio SONORA, Pontianak, pada tanggal 29 Oktober 2021 lalu, yang menyatakan bahwa ekosistem lahan basah, ibaratnya sebagai 'lahan parkir' untuk air tawar, keanekaragaman hayati, dan penyimpan karbon. Jika 'lahan parkir' ini terganggu, apalagi sampai rusak, maka ketiga komponen di atas akan hilang dan berdampak luas pada kehidupan manusia.

Luas lahan basah (termasuk gambut) di dunia diperkirakan sekitar 700 juta hektar, dimana sekitar 10% nya berada di Indonesia. Dari total luasan lahan basah di Indonesia tersebut 20,6 juta hektar (dulunya) berupa hutan rawa gambut, dan 3,3 juta hektar berupa hutan mangrove, sedangkan sisanya terdapat sebagai danau, waduk, telaga, sungai, sawah, dan lainnya. Dengan luasan lahan gambut tropis dan mangrove yang terluas di dunia, Indonesia menjadi negara yang memiliki peran besar dalam mitigasi perubahan iklim. Nyoman mengatakan bahwa "Dari 700 juta hektar lahan basah dunia tersebut diperkirakan mengandung cadangan karbon sebesar 500 milyar ton karbon (C) yang kalau teremisikan ke udara kira-kira setara dengan 1,8 triliun ton karbon dioksida (CO₂). Di Indonesia saja, gambut dan

mangrove menyimpan cadangan karbon sekitar 50 milyar ton C atau setara dengan 180 milyar ton CO₂".

Konversi lahan/hutan gambut menjadi pemukiman, perkebunan sawit dan pertanian yang disertai pembukaan kanal menyebabkan drainase yang tidak terkendali di gambut, mengakibatkan gambut menjadi kering dan mudah terbakar. Sementara itu pembabatan hutan mangrove untuk diubah menjadi lahan pemukiman atau pertambangan tidak hanya menghilangkan tegakan mangrove akan tetapi juga hilangnya fungsi kawasan dalam melindungi pesisir dan penyerapan karbon dioksida. Rusaknya hidrologi lahan gambut dan hilangnya tegakan mangrove di pesisir, menyebabkan mudahnya karbon terlepas ke udara kemudian akan teroksidasi menjadi CO₂. Lapisan atmosfer sebagai 'perisai' bumi dari terpaan benda-benda luar angkasa dan panas matahari akan semakin terkikis seiring bertambahnya konsentrasi gas CO₂ dan gas-gas polutan lainnya seperti gas metan (CH₄), CFC, dan klorin. Menurut para ahli, lapisan ozon (O₃) yang mendiami dua lapisan atmosfer yang paling dekat dengan bumi, yaitu lapisan troposfer (kandungan O₃ sekitar 10%) dan stratosfer (kandungan O₃ sekitar 90%), menjadi lapisan yang paling dominan mengalami gangguan dan penipisan akibat efek gas rumah kaca.

Emisi gas rumah kaca yang memicu pemanasan global yang kemudian berdampak terjadinya perubahan iklim, haruslah segera ditangani dan direduksi.

"Semua negara di dunia harus turut bertanggung jawab dan terlibat dalam upaya-upaya mitigasi dan adaptasi akibat perubahan iklim," tegas Nyoman.

Dampak dari perubahan iklim dirasakan hampir di seluruh negara di dunia, namun umumnya negara-negara miskin dan berkembanglah yang lebih terdampak dan terancam dikarenakan minimnya anggaran yang dimiliki untuk mengatasi krisis global tersebut. Lebih lanjut Nyoman mengatakan bahwa "Pentingnya dukungan bersama dan komitmen oleh negara-negara maju untuk membantu pendanaan negara-negara miskin dan berkembang dalam menanggulangi dan mengatasi dampak perubahan iklim. Dukungan tersebut sebaiknya tidak diberikan dalam bentuk dana utang, karena untuk mengembalikan pinjaman tersebut, sumberdaya alam (misal: komoditas tambang, mangrove dan gambut) akan lebih tereksplorasi. Lingkungan semakin rusak dan kemiskinan akan semakin parah. Kondisi alam yang semakin rusak akibat over-eksploitasi tersebut pada akhirnya akan meningkatkan emisi GRK atau mengurangi kapasitas mitigasi GRK," ungkapnya.

Pengelolaan gambut sebagai satu kesatuan Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG), harus dilakukan secara terpadu dan serentak. Begitu juga hutan mangrove di pesisir yang menjadi bagian dari kesatuan Daerah Aliran Sungai (DAS), pengelolannya harus terintegrasi mulai dari hulu sampai hilir.



Kaum perempuan juga turut terlibat aktif dalam pembangunan sekat-sekat kanal di gambut, dalam rangka mengembalikan tata kelola air gambut yang telah terganggu akibat pembukaan kanal-kanal tersebut. (Foto: Didik Fitrianto)

Dibutuhkan tata kelola ekosistem gambut dan mangrove yang tidak bersifat parsial dan temporal. Mengembalikan kondisi hidrologi lahan gambut dan mempertahankan keberadaan hutan mangrove, tidak hanya menjadi langkah penting adaptasi terhadap iklim yang berubah, akan tetapi juga dapat memitigasi emisi gas rumah kaca yang sudah terlanjur terlepas di atmosfer bumi kita.

Ada tiga pendekatan ideal yang dapat diterapkan pada pengelolaan lahan gambut dan mangrove, yaitu: *rewetting* (pembasahan kembali), *rehabilitation/ restoration*, dan *revitalization*. Restorasi hidrologi gambut dilakukan dengan penyekatan kanal-kanal terbuka, sehingga kondisi gambut di sekitar sekat akan terbasahi kembali. Sebaliknya, untuk daerah mangrove yang berada di daerah estuari, pembasahan kembali justru dilakukan dengan membuka semua sumbatan atau sekat di sepanjang

DAS sehingga kondisi salinitas ideal tempat bertemunya air laut dengan air sungai di pesisir yang menjadi habitat mangrove dapat terus terjaga.

Kegiatan rehabilitasi dan restorasi juga sama-sama dilakukan di kedua ekosistem lahan basah tersebut. Rehabilitasi di gambut haruslah mempertimbangkan jenis tanaman yang tahan genangan, jenis tanaman asli gambut seperti Ramin, Jelutung, dan Sagu. Begitu juga rehabilitasi mangrove yang akan dilakukan di pesisir haruslah mempertimbangkan jenis tanaman yang mampu bertahan sesuai substrat tanahnya. Yang menarik, untuk ekosistem pesisir, rehabilitasi mangrove juga dapat dilakukan secara alami tanpa harus menanam, yaitu melalui pembangunan struktur pemerangkap sedimen. Sedimen yang terperangkap di belakang struktur itulah yang akan menjadi media tumbuh bibit tanaman mangrove secara alami.

Upaya-upaya untuk mengembalikan ketangguhan ekosistem, haruslah dibarengi dengan peningkatan ketangguhan masyarakat di sekitarnya. Edukasi dan peningkatan kesadaran, peningkatan kemampuan, serta pengembangan mata pencaharian masyarakat, merupakan langkah-langkah revitalisasi ketangguhan masyarakat guna mendukung ketangguhan ekosistem.

Harmonisasi alam dan manusia sudah merupakan kodrat dan amanat Illahi. Jika itu hilang atau tidak seimbang saja, maka petaka yang terjadi. ••

MASYARAKAT TANGGUH – BENCANA LULUH
LINGKUNGAN LESTARI – MASYARAKAT BERSER

* Publication Officer, YLBA
Email: publication@wetlands.or.id

..... sambungan dari halaman 5

Mendorong Percepatan Kebijakan dan Praktik Pengurangan Risiko Bencana

Hampir 70% ekosistem gambut berada di Kawasan non konsesi, hal ini menjadi tantangan sendiri, dimana kegiatan restorasi perlu dinternalisasikan ke dalam rencana pembangunan hingga di tingkat desa dan melibatkan masyarakat sebagai subyek utamanya.

BRGM sejauh ini telah melakukan pendekatan restorasi gambut Desa Mandiri Peduli Gambut (DMPG) dengan Pendekatan Restorasi Gambut berbasis Desa di atas luasan 4,6 juta hektar lahan gambut yang melibatkan 640 desa peduli gambut hingga tahun 2020. Tahun 2021, BRGM mengembangkan konsep desa mandiri peduli gambut di 101 desa. Saat ini BRGM tengah mengembangkan Indeks Desa Peduli Gambut sebagai suatu mekanisme pengukuran keberhasilan pengembangan DMPG di Indonesia. Muhammad Yusuf, Kepala Kelompok Kerja Partisipasi dan Kemitraan BRGM menyampaikan beberapa pembelajaran yang diperoleh dari pengembangan DMPG diantaranya pentingnya pendampingan, internalisasi RPPEG ke dalam rencana pembangunan desa dan pelibatan *stakeholder* di daerah, pengembangan kawasan perdesaan, pengembangan mini demplot dan BUMDes.

Di sisi lain, Direktur Mitigasi Bencana, BNPB, Taufik Kartiko menambahkan untuk mewujudkan pelestarian alam, mencegah bencana kebakaran hutan dan lahan serta meningkatkan kesejahteraan

masyarakat, dibutuhkan kegiatan pelatihan edukasi dan evaluasi, diantaranya dengan membentuk program Sekolah Lapang. Melalui Sekolah Lapang diharapkan perilaku masyarakat akan berubah dari pemanfaatan lahan gambut dengan membakar menjadi pemanfaatan tanpa bakar.

"Jadi prinsip mitigasi karhutla adalah mengedepankan sisi edukatif, kolaboratif pentahelix, sederhana, aplikatif, meningkatkan ekonomi, memberdayakan budaya lokal, keberlanjutan dan kemandirian," katanya.

Sementara itu, Vernando Aruan, *Community Development Specialist*, YLBA, mempresentasikan salah satu praktik restorasi gambut yang dipadukan dengan mitigasi bencana bersama dengan 35 kelompok masyarakat di Tapanuli Selatan. Kegiatan ini merupakan dua program yang dilaksanakan secara berdampingan, masing-masing didanai oleh European Union dan IKI Germany. Beberapa hal yang menarik dari praktik baik ini adalah penggunaan material sekat kanal yang menggunakan batang pinang, tanaman asli setempat, dan integrasi *rewetting* dengan *livelihood* melalui pengembangan *aquaculture* pada kanal-kanal yang disekat. Selain itu, pada program ini, kegiatan revegetasi yang dilakukan dengan menanam tanaman asli gambut setempat

seperti Pakkat (sejenis rotan). Kegiatan ini dilaksanakan dengan mekanisme *Bio-Rights* atau pinjaman bersyarat yang diberikan kepada kelompok. Selama hampir setahun berjalan, pinjaman ini digunakan masyarakat untuk mengembangkan mata pencaharian alternatif yang memberikan tambahan penghasilan masyarakat sekitar 300-400 ribu rupiah per bulannya untuk setiap KK. Mekanisme ini berjalan dengan baik dan terbukti mendorong swadaya masyarakat dalam mencegah kejadian karhutla. Masyarakat secara aktif melakukan patroli karhutla dan membangun 11 menara pemantau karhutla dan 29 embung secara swadaya.

Eco-DRR bukan merupakan hal yang baru. Syarifah Dalimuthe, peneliti kluster ekologi BRIN menyebutkan bahwa konsep ini sudah muncul dari tahun 2000-an, dan mulai meningkat sejak bencana tsunami di tahun 2004. Namun studi di lahan gambut masih sangat sedikit hingga mulai naik di tahun 2019. Dari hasil studi, empat konsep yang harus dikuatkan dalam upaya pengarusutamaan Eco-DRR diantaranya tata ruang, pendanaan, peraturan pendukung, dan *livelihood*. "Penguatan keterlibatan dan *sustainable livelihood* menjadi kunci dalam implementasi Eco-DRR oleh masyarakat," pungkasnya. ••

*Programme Coordinator
Risk Management & Resilience,
Yayasan Lahan Basah
Email: susan.lusiana@gmail.com

..... sambungan dari halaman 7

Kesepakatan Konservasi Desa untuk Pengelolaan Gambut

Kepala Pusat Studi Lingkungan Hidup (PSLH) Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan (UMTS), Zulkarnaen Hasibuan berharap, praktik baik pengelolaan gambut yang sudah dilakukan oleh YLBA dan kelompok ini harus dilanjutkan. PSLH UMTS akan mengambil peran sebagai bagian Tri Darma perguruan tinggi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian. Kami terbuka untuk diajak kerja sama termasuk oleh kelompok. Ia menambahkan lahan gambut punya potensi untuk dijadikan sebagai sumber ekonomi terutama perikanan, sayang sekali kalau tidak dilanjutkan, YLBA sudah mengawalinya dengan sangat baik melalui pembuatan KJA.

Untuk mendukung upaya yang sudah dilakukan oleh kelompok di Muara Manompas dan Terapung, peserta yang hadir dalam miniloka membuat kesepakatan konservasi desa untuk pengelolaan gambut berkelanjutan. Peserta terdiri dari Dinas Lingkungan Hidup, Bappeda, BPBD, Dinas Perikanan, Dinas Pertanian, PTPN III, PT MIR, Danramil Batang Toru, Polsek Batang Toru UMTS, Universitas Graha Nusantara, IAIN, Yayasan Ekosistem Lestari, KMMK, NNB Tapsel, Forester, Oppuk, Wansep, Lembaga Agro Forestry Tapsel, Camat Muara Batang Toru, Lembaga Sipirok Lestari, Konservasi International Indonesia, 20 kelompok PME dan 15 kelompok Devco.

Kesepakatan konservasi desa berisi antara lain kewajiban bagi masyarakat di Muara Manompas dan Terapung menjaga lahan gambut seluas 300 H, melarang membuat atau memperpanjang kanal di area lahan gambut, menginisiasi berdirinya lembaga

Desa untuk melanjutkan kegiatan konservasi lahan Gambut Desa, Mendorong Dana Desa atau kelurahan untuk keperluan konservasi lahan gambut dan kegiatan usaha untuk kelompok dengan mekanisme *Bio-Rights*, dilarang membakar di lahan gambut, memperkuat organisasi MPA (Masyarakat Peduli Api), membuat lubang larangan di kanal gambut sepanjang 800 meter dan membuat sekat kanal baru baik dari swadaya masyarakat maupun bantuan pemerintah.

Ekspedisi Gambut

Setelah menyepakati konservasi desa untuk pengelolaan gambut berkelanjutan, peserta miniloka melakukan ekspedisi lahan gambut di Muara Manompas. Tujuan ekspedisi gambut untuk mengenalkan kepada peserta untuk melihat praktik pengelolaan gambut yang sudah dilakukan oleh YLBA bersama kelompok. Praktik pengelolaan lahan gambut dengan pendekatan 3 R (*rewetting*, revegetasi, dan revetalisasi).

Lokasi pertama yang dikunjungi adalah sekat kanal yang dibangun oleh kelompok. Di lokasi ini peserta melihat secara langsung fungsi sekat kanal untuk pembasahan lahan gambut. Setelah itu peserta diperkenalkan praktik budidaya ikan lele di kanal berupa KJA (Keramba Jaring Apung). Selanjutnya peserta diajak ke lokasi penanaman jelutung yang ditanam oleh kelompok, dimana para peserta dijelaskan tentang cara menanam jelutung, perawatan dan manfaatnya. Tidak sekedar melihat dan tanya jawab, peserta juga diajak secara langsung untuk melakukan praktek pengukuran TMA (Tinggi

Muka Air) di salah satu sumur pantau yang dipandu oleh salah satu anggota kelompok.

Lokasi selanjutnya yang dikunjungi peserta adalah tempat budidaya ikan lele kolam terpal dan pembuatan pakan alternatif ikan, rumah magot. Di tempat ini peserta melihat dan berdiskusi dengan kelompok tentang cara budidaya lele, pembuatan magot, sistem produksi dan pemanenan. Menurut Darmansyah, dosen Universitas Muhammadiyah Tapsel, budidaya ikan yang terintegrasi dengan rumah magot akan sangat membantu petani, karena kebutuhan pakan bisa dipenuhi secara mandiri. Ketergantungan dengan pakan pabrik bisa dikurangi dan menghemat biaya budidaya.

Kegiatan ekspedisi gambut disambut antusias oleh para peserta, terutama oleh mahasiswa. Menurut salah satu mahasiswa, Triana Ganteng Panjaitan, kegiatan ekspedisi untuk mengenalkan fungsi dan manfaat lahan gambut secara langsung sangat menarik. Selama ini, pengetahuan tentang gambut masih sangat minim dan hanya mengenal sebatas dari buku dan internet. Setelah mengetahui fungsi dan manfaat lahan gambut, para mahasiswa sangat berharap lahan gambut benar-benar dijaga dan dilestarikan agar tidak terjadi lagi bencana dan terus dapat memberikan manfaatnya bagi masyarakat. Menurut para mahasiswa menjaga gambut, menjaga kehidupan. ••

* *Community Development Officer,*
Yayasan Lahan Basah
Email: didikfitrianto@gmail.com

WETLANDS INTERNATIONAL

GLOBAL OFFICE

PO Box 471
6700 AL Wageningen
The Netherlands
post@wetlands.org
www.wetlands.org

INDONESIA

Jl. Bango No. 11
Bogor 16161
admin@wetlands.or.id

ISSN:

0854-963X

Foto Cover:

Lahan basah yang sehat dan kuat akan selalu memberikan nilai dan manfaatnya bagi manusia dan makhluk hidup lainnya

(Ilustrasi: Mazaya Syakirah)

Warta Konservasi Lahan Basah (WKLB) adalah majalah yang diterbitkan oleh Yayasan Lahan Basah (YLBA) / Wetlands International secara berkala setiap tiga bulan sekali (triwulan), dalam rangka mendukung pengelolaan dan pelestarian sumberdaya lahan basah di Indonesia. WKLB diterbitkan untuk mewadahi informasi-informasi seputar perlahanbasahan di Indonesia yang disampaikan oleh berbagai kalangan baik secara individu maupun kolektif. Diharapkan media WKLB ini dapat turut berperan dalam meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan kepedulian seluruh lapisan masyarakat untuk memanfaatkan dan mengelola lahan basah secara bijak dan berkesinambungan.



indonesia.wetlands.org



Yayasan Lahan Basah



yayasanlahanbasah



Yayasan Lahan Basah



Wetlands
INTERNATIONAL

Yayasan Lahan Basah (YLBA)